

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

MODEL BUSINESS PLAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan



Tim Peneliti

**Rulinawaty
Andriyansah
Alwi
MAwardi, S.E**

**Ketua
Anggota
Anggota
Administrasi**

**Universitas Terbuka
Universitas Terbuka
Universitas Hasanuddin
Universitas Terbuka**

**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS PENGUSUL :

1. Ketua
 - Nama : Rulinawaty
 - Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 - Fakultas : FHISIP
 - Program Studi : Administrasi Publik
2. Anggota
 - A. Anggota Peneliti
 - Nama : Andriyansah, S.E., M.M
 - Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 - Fakultas : Fakultas Ekonomi
 - Program Studi : Ilmu Manajemen
 - B. Anggota Peneliti
 - Nama : Alwi
 - Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
 - Fakultas : FHISIP
 - Program Studi : Administrasi Publik
 - C. Administrasi
 - Nama : Rusliadi
 - Fakultas : FHISIP
 - Program Studi : Administrasi Negara
 - D. Administrasi
 - Nama : Maward, S.E
 - Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
 - Unit : LPPM

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul : **MODEL BUSINESS PLAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan**

Pelaksana

1. Ketua

Nama Lengkap : Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si
NIP/NIDN : 197803242001122002/ 00240307
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan/Fakultas : Administrasi Publik/ FHSIP
No. HP dan email : 082188943471/

2. Anggota (ke-1)

Nama Lengkap : Dr. E. Andriyansah, S.E.,M.M
NIP/NIDN : 197912162008121003/ 0016127902
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Manajemen
Jurusan/Fakultas : Manajemen/ Fakultas Ekonomi
No. HP dan email : 081363242526/ andri@ecampus.ut.ac.id

3. Anggota (ke-2)


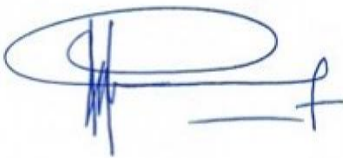

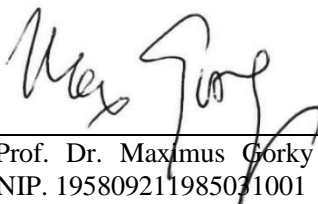
Nama Lengkap : Prof.Alwi
NIP/NIDN : 196310151989031006./ 0015016306
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan/Fakultas : Administrasi Publik/FHSIP
No. HP dan email : 081242565289/ alwifisip@gmail.com

4. Anggota (ke-3)

Nama Lengkap : Mawardi, S.E
NIP/NIDN : 198204042005011001

Jabatan Fungsional : Penata Muda/ III.a
 Program Studi : -
 Jurusan/Fakultas : LPPM-Sekretariat
 No. HP dan email : 081290623623/ ardi@ecampus.ut.ac.id

Tangerang Selatan, 22 Desember 2021

Menyetujui,	
Dekan FHSIP UT 	Ketua Pelaksana 
Dr. Sofjan Aripin, M.Si. NIP. 196606191992031002	Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si NIP. 197803242001122002
Mengetahui	
Ketua LPPM UT 	Kepala Pusat Penelitian Keilmuan 
Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A.,Ph.D NIP. 196107241987102003	Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, NIP. 195809211985031001

PRAKATA

Penelitian ini merupakan salah satu kewajiban dari Tridarma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Penelitian ini bertujuan melihat implementasi kebijakan pangan yang menjadai masalah yang kompleks yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan masyarakat. pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat penyediaan pangan. Kontribusi diharapkan dari pihak-pihak luar terutama organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya networking yang memungkinkan implementasi kebijakan ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan efisien.

Laporan penelitian berjudul MODEL BUSINESS PLAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN:Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan anggaran penelitian LPPM UT dengan nomor kontrak 23250/UN31.LPPM/PT.01.03/2021. Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua unsur yang telah terlibat dalam penelitian ditengah wabah pandemi covid-19 ini, besar harapan Peneliti, hasil penelitian ini memberikan dampak yang positif, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam penanganan ketahanan pangan di Indonesia dimasa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 2021

Ketua Peneliti,

Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	:	Halaman
Halaman Identitas	:	ii
Halaman Pengesahan	:	iv
Kata Pengantar	:	vi
Daftar Isi	:	vii
Daftar Tabel	:	viii
Daftar Gambar	:	ix
Ringkasan	:	1
BAB I. PENDAHULUAN	:	
1. Latar Belakang Penelitian	:	3
2. Rumusan Masalah	:	4
3. Tujuan Penelitian	:	5
4. Urgensi Penelitian	:	5
5. Indikator Kinerja	:	5
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	:	
1. Public Governance Network dan Kompleksitas Implementasi Kebijakan	:	7
2. Local Food Governance Network : Business Plan Kebijakan Ketahanan Pangan	:	7
BAB. III. METODE PENELITIAN	:	
1. Lokasi Penelitian	:	10
2. Desain dan Strategi Penelitian	:	10
3. Informan	:	11
4. Teknik Pengumpulan Data	:	11
5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	:	11
BAB.IV. HASIL DAN LUARAN	:	
A. HASIL	:	
1. Proses Food Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Pangan Di Provinsi Sulawesi Selatan	:	12
2. Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Dewan Ketahanan Pangan	:	13
3. Proses Peran dan Fungsi Aktor Organisasi (Dewan Ketahanan Pangan)	:	16
4. Komunikasi Aktor	:	16
5. Kepercayaan antar Aktor	:	17
6. Pemahaman Aktor Terhadap Issu Pangan	:	17
B. LUARAN PENELITIAN	:	25
BAB. V	:	
1. Simpulan dan Saran Penelitian	:	27
DAFTAR PUSTAKA	:	65
LAMPIRAN	:	
1. Draf Desain Aplikasi Model Busines Plan Kebijakan Ketahanan Pangan	:	29
2. Dokumentasi Foto-Foto Penelitian	:	30
3. LOA Artikel	:	34
4. Berita Koran Nasional	:	35

DAFTAR TABEL

Tabel	:	Uraian	Halaman
Tabel 1.1	:	Indikator Kinerja	8
Tabel 2.1	:	Skor dan Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Level Provinsi dan Nasional Yang Telah Dicapai	10
Tabel 4.1	:	Program Anggota Dewan Ketahanan Pangan	15
Tabel 4.2	:	Kepercayaan dalam Struktur Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar	:	Uraian	Halaman
Gambar 1	:	State Of The Art Penelitian Local Governance Network Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kebijakan Ketahanan Pangan	13
Gambar 2	:	Komposisi Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan Nasional	19
Gambar 3	:	Sasaran Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2024 Nasional (Menggunakan Data Dasar Susenas 2021)	21

ABSTRAK

Pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab terhadap public goods, dalam hal ini tanggung jawab untuk masalah pangan di Indonesia. Masalah pangan adalah masalah yang kompleks sehingga pemerintah tidak memungkinkan lagi bekerja sendirian, pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat penyediaan pangan. Kontribusi diharapkan dari pihak-pihak luar terutama organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya networking yang memungkinkan implementasi kebijakan ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan efisien.

Indonesia adalah negara agraris, beberapa wilayah di Indonesia merupakan lumbung pangan, namun berdasarkan indeks ketahanan global berdasarkan data pada tahun 2019 Indonesia masih berada di peringkat 71 dari 113 negara yang diobservasi dan di tahun 2020 alami peningkatan ke peringkat 62. Pada FSV menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan pada tahun 2019 menjadi 70 Kabupaten/Kota tahun 2020. Hal ini menunjukkan dengan kebijakan anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah pangan tidak signifikan dengan tujuan kebijakan pangan. Hal yang sama Provinsi Sulawesi selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 8,99 persen (BPS 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pangan menghadapi masalah yang kompleks yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa lagi menjadi aktor tunggal untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu membangun networking, sinergitas kepada para pemangku kepentingan, baik secara lembaga, individu maupun organisasi. Menciptakan networking, sinergitas antara para aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks disebut dengan governance network dalam teori public governance.

Dari fenomena diatas yang menjadi fokus penelitian adalah proses governance network pada level pemerintahan lokal. Hal ini penting karena pemerintah lokal menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan pangan. Oleh karena itu tujuan utama penelitian ini adalah membangun business plan local food governance dalam peningkatan kinerja kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi tujuan khusus: (1) Kelayakan industry pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan khusus tahun pertama); (2) Feasibility Study pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan tahun ke 2); dan 3) membangun model business plan pemerintahan lokal dalam food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan tahun ke 3)

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan strategi studi kasus. penelitian tahun pertama (2021) dan tahun kedua (2022) menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kasus dan settingnya. Pada penelitian tahun ketiga (2023), menggunakan proses pengolahan data, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan analisis datanya menggunakan teknik penjadwalan pola dan analisis deret waktu.

TKT penelitian tahun pertama (2021) adalah TKT 7, untuk menetapkan prinsip dasar riset tentang eksplorasi kelayakan industry proses local food governance network. Tahun kedua (2022) menggunakan TKT 8, telah tersusunnya feasibility study tentang peran pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network. Tahun ketiga (2023) telah menetapkan rancangan dan metodologi penelitian untuk merancang model business plan local food governance network.

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama menunjukkan proses food governance network meliputi: 1) Aktor-aktor yang terlibat dalam Dewan Ketahanan Pangan. Keterlibatan mereka tidak efektif karena masing-masing menjalankan perannya berdasarkan Tupoksinya. 2) Komunikasi antar aktor. Komunikasi ini masih tetap berjalan berdasarkan hirarki. 3) Kepercayaan antar aktor. Para aktor belum memiliki kepercayaan kolektif sehingga belum terbangun program ketahanan pangan kolektif. 4) Pemahaman aktor terhadap isu pangan. Mereka memahami isu ini cenderung berdasarkan aktor itu sendiri, bukan pemahaman kolektif. Sehingga dengan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini maka Model Aplikasi untuk Kelayakan Industri yang didesain peneliti mampu menjembatani gap yang muncul pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan

Kata Kunci : Local governance network; Local food governance network; Kebijakan publik; Implementasi kebijakan; dan Ketahanan pangan

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pandemic Covid-19 salah satu kondisi dengan ketidakpastian dan kerumitan. Suatu trend yang mengubah dunia, mengubah tata kelola pemerintahan. Pandemic ini memengaruhi domain negara, industry, lembaga, organisasi, bahkan masyarakat dengan cara heterogen. Trend pandemic memerlukan tantangan dan peluang (Guillen & Ontiveros, 2019). Masalah pangan di tengah pandemic di negara maju dan berkembang menjadi masalah nyata dan berat, menyebabkan penderitaan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.

Perkembangan ini membuat semakin sulit untuk mencapai tujuan SDGs 2030 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Masalah pangan juga menjadi perhatian di media dan agenda politik negara maju saat ini. Meningkatnya jumlah orang yang rawan pangan dan keamanan global berkontribusi memperbarui kepentingan international dalam kebijakan pangan negara-negara berkembang. Kebijakan pangan melibatkan berbagai aktor atau pemangku kepentingan. Negara berkembang menggunakan konsep ketahanan pangan dan berbagai pendekatan untuk mempromosikan ketahanan pangan, yaitu kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan pokok. Dengan demikian, kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan harus mencakup langkah-langkah peningkatan pendapatan dan produksi pangan.

Di Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi masalah pangan yang kompleks, kebijakan ini melibatkan aktor pangan yang terlibat secara langsung dalam proses implementasi kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, masalah ketahanan pangan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai fenomena yang digambarkan diatas menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan wicked problem (Robert, 2000; Termeer et.al, 2015) yang tidak memungkinkan dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, melainkan menuntut keterlibatan semua aktor kebijakan ketahanan pangan (Agranoff & McGuire, 2003; Klijin, 2008; O'Leary et.al, 2009; Agranoff, 2012).

Indonesia negara agraris, beberapa wilayah di Indonesia merupakan lumbung pangan, namun berdasarkan indeks ketahanan global berdasarkan data GFSI pada tahun 2019 Indonesia masih berada di peringkat 71 dari 113 negara yang diobservasi dan di tahun 2020 alami peningkatan ke peringkat 62. Hal ini menunjukkan dengan kebijakan anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah pangan tidak signifikan dengan tujuan kebijakan

pangan. Hal yang sama Provinsi Sulawesi selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 8,99 persen (BPS 2020).

Fenomena implementasi kebijakan pangan menghadapi masalah yang kompleks yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan sehingga pemerintah tidak bisa lagi menjadi aktor tunggal, pemerintah perlu membangun networking, sinergitas kepada para pemangku kepentingan. Menciptakan networking, sinergitas antara para aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks disebut dengan governance network dalam teori public governance network. **Tujuan khusus:** (1) Kelayakan industry pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan (2) Feasibility Study pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network di Provinsi Sulawesi Selatan; dan 3) membangun model business plan pemerintahan lokal dalam food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Public governance network merupakan perspektif baru dalam manajemen dan kebijakan publik untuk mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam penyelesaian masalah good governance dan publik goods. Hal ini semakin memperjelas posisi dan kebaharuan penelitian ini, yaitu local food governance network dalam rangka membangun model business plan kebijakan ketahanan pangan.

2. Rumusan Masalah.

Permasalahan dalam penelitian pengembangan dan Inovasi (PPI) yang akan di teliti adalah:

Tahun Pertama (2021) Bagaimana kelayakan industry pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun Kedua (2022) Bagaimana feasibility study pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network di Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun ketiga (2023) Membangun model business plan pemerintahan lokal dalam food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan

3. Tujuan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian pengembangan dan Inovasi (PPI) yang akan di teliti adalah:

Tahun Pertama (2021) Fokus tujuan penelitian pada kelayakan industry pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun Kedua (2022) Fokus tujuan penelitian feasibility study pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun ketiga (2023) Fokus penelitian membangun model business plan pemerintahan lokal dalam food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Urgensi Penelitian

Salah satu fenomena menarik saat ini yang paling banyak menyita perhatian dalam public governance network adalah tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks. Publik governance network adalah kolaborasi pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dalam jaringan masyarakat kontemporer untuk mengatasi masalah yang kompleks dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakannya, dan penyampaian layanan publik yang sulit dikelola. (Klijn & Koppenjan, 2016). Kebijakan pangan di Indonesia pada taraf implementasi kebijakan menghadapi masalah yang kompleks yang berpengaruh pada kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan masyarakat.

5. Indikator Kinerja

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama tiga tahun dengan skema pentahapan penelitian menjadi tiga tahap yaitu : 1) Kelayakan industry pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Feasibility Study pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network di Provinsi Sulawesi Selatan; dan 3) membangun model business plan pemerintahan lokal dalam food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Publik Governance Network dan Kompleksitas Implimentasi Kebijakan

Governance network merupakan recent perspective dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik yang berbeda dengan perspektif lain dalam penyelenggaraan tersebut. Perspektif ini lebih menekankan pendekatan informal ketimbang formal dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan publik. Hal ini dilakukan karena tidak semua pemangku kepentingan berada dalam suatu sistem birokrasi pemerintahan. Demikian pula, masalah dan kebutuhan publik tidak lagi merupakan kompleks tetapi lebih dari itu ia merupakan wicked problem (Robert, 2000; Termeer et.al, 2015). Perspektif ini jawaban terhadap kompleksitas penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik (Klijn & Koppenjan, 2016). Sehingga dalam menyelesaikan masalah publik sering terjadi konflik kepentingan di antara mereka.

Implementasi kebijakan merupakan hasil interaksi antara para pemangku kepentingan yang berbeda kepentingan, tujuan, dan strategi. Fenomena interaksi yang kompleks ini dapat dijelaskan oleh teori seperti dependency relations, public choice, and complex decision-making (Scharpf, F.W.,1978). Interaksi antar pemangku kepentingan dapat berlangsung dalam governance network karena ada kepentingan sumber-sumber daya. Para pemangku kepentingan melakukan kolaborasi di antara mereka karena masing-masing ingin memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkannya. Sementara sumber-sumber daya tersebut dikendalikan oleh pemangku kepentingan yang lain (Jones, 2004; Jaffee, 2001).

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada suatu kebutuhan yang berkembang untuk struktur antar organisasi dan organisasi untuk menghadapi kompleksitas interaksi yang berkembang dalam lingkungan publik dan privat (Klijn, 2008). Hal ini terjadi karena pemerintah sebagai penanggung jawab utama terhadap penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan publik menyadari bahwa ia tidak mungkin akan menyelesaikannya dengan efektif kalau ia tidak

berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai pemilik sumber-sumber daya (Agranoff & McGuire, 2003; Klijn, 2008; O'Leary et.al, 2009; Agranoff, 2012). Implementasi kebijakan publik melibatkan beberapa organisasi, sehingga kesuksesan suatu kebijakan publik sangat ditentukan kerja sama antar organisasi dan bahkan koordinasi dengan organisasi tersebut (O'Toole, Jr. 2005; Manzel, 1987).

2.2 Local Food Governance Network: Business Plan Kebijakan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan public goods sebagaimana dikemukakan oleh Timmer (2004). Dalam perspektif administrasi publik penyediaan barang-barang publik sudah merupakan tanggung jawab negara baik langsung maupun tidak langsung. Penyediaan dan distribusi pangan secara langsung apabila pemerintah menyelenggarakan secara langsung. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan pangan berupa UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian pula, ketahanan pangan menunjukkan kemandirian dan kedaulatan suatu negara, karena apabila terjadi krisis pangan maka kedaulatan negara bisa terancam.

Hal ini menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya penyediaan pangan tetapi juga meliputi keamanan, nutrisi, dan kesehatan sehingga manusia bisa menjalankan aktivitas hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ketahanan pangan meliputi lima komponen penting, yaitu: 1) availability; 2) access; 3) utilization; 4) sustainability; 5) stability (Timmer, 2017). Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah untuk ketahanan pangan merupakan peran yang sangat berat dan kompleks. Pemerintah tidak akan mungkin melakukannya sendirian tetapi perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Sehingga pemerintah perlu merancang business plan agar mereka dapat bersinergi dalam menjalankan tugas yang berat dan kompleks tersebut. Peran pemerintah dalam hal ini adalah tidak hanya mampu mengkoordinir mereka

dan kegiatannya, tetapi juga mampu memenej saling ketergantungan di antara mereka (Mandell, 2000).

Tabel 1.1 Indikator Kinerja

No	Jenis Luaran		Luaran		Indikator Capaian			
			Wajib	Tambahan	TS 2021	TS +1 2022	TS+2 2023	TS+n
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	International	√		Accepted	Publishsed	Publishsed	
		Nasional terakreditasi						
		Nasional tidak terakreditasi						
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional						
		Nasional						
		Lokal						
3	Keynote Speaker/Invited) Dalam temu ilmiah	Internasional		√	Draf	Ada (Proceeding)		
		Nasional						
		Lokal						
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	International						
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten sederhana	√	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
		Hak cipta	Tidak ada	√	Tidak ada	Draf	Published	
		Merek dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Rahasia dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Desain produk industri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Indikasi geografis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Perlindungan varietas tanaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Desain tata letak sirkuit terpadu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
6	Buku (ISBN)	Tidak ada	√	Tidak ada	Draf	Published		
7	Book-chapter (ISBN)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		
8	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	International	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Nasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Regional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
9	Angka partisipasi dosen*	√		3	3	3		

10	Dokumen feasibility study	√	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	
11	Business plan	√	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
12	Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan atau model kebijakan strategis)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

BAB. III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kabupaten tersebut merupakan daerah lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, namun mereka memiliki indeks ketahanan pangan yang bervariasi dan cenderung kurang menggembirakan,. Selain itu, komoditas pangan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah 3 jenis komoditas pangan unggulan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu **beras, jagung, dan kakao**. Penentuan tersebut didasarkan atas tingkat perhatian pemerintah sangat besar, yang ditandai dengan besarnya bantuan yang dialokasikan pada ketiga komoditas tersebut.

3.2 Desain dan Strategi Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penggunaan desain ini untuk mengungkap dan menjelaskan local food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan. Strategi Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Strategi ini sangat cocok dengan penelitian ini, karena antara tahap satu berbeda dengan tahap lainnya, di mana tahap pertama (2020) menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan tipe studi kasus eksploratif (Yin, 2000). Pada tahap ini peneliti berusaha mengeksplorasi proses food

Tabel 3.1.1

Skor dan Peringkat Indeks Ketahanan Pangan
Level Provinsi dan Nasional 2018

<u>Kabupaten</u>	<u>Skor</u>	<u>Peringkat Level Provinsi Sulawesi Selatan</u>	<u>Peringkat Level Nasional</u>
<u>Bone</u>	77,17	12	116
<u>Wajo</u>	81,24	7	33
<u>Soppeng</u>	79,09	10	72
<u>Luwu</u>	76,10	14	141
<u>Luwu Utara</u>	76,45	13	133

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018

3.3 Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah individu dan lembaga sebagai stakeholders dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: a) Dewan Ketahanan Pangan; b) Tim Koordinasi pengadaan pangan; c) Tim monitoring dan evaluasi pengadaan pangan; d) Para Dinas-dinas yang terkait dengan pangan (kasus pada tiga komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, dan kakao); e) Para konsultan dan fasilitator pangan; f) Para petani dan kelompok tani; g) Para tokoh masyarakat petani.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan terutama pada *tangible objects*, seperti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang tersebut diatas, sedangkan teknik dokumentasi adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan studi ini.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Penentuan analisis data didasarkan pada tujuan penelitian, di mana penelitian tahap pertama (2020) dan tahap kedua (2021) menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992) dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kasus dan settingnya. Pada penelitian tahap ketiga (2022), menggunakan proses pengolahan data yang sama dengan tahap 1 dan 2, dan analisis datanya menggunakan teknik penjadohan pola dan analisis deret waktu.

BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN LUARAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Food Governance Network dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Pangan Di Provinsi Sulawesi Selatan

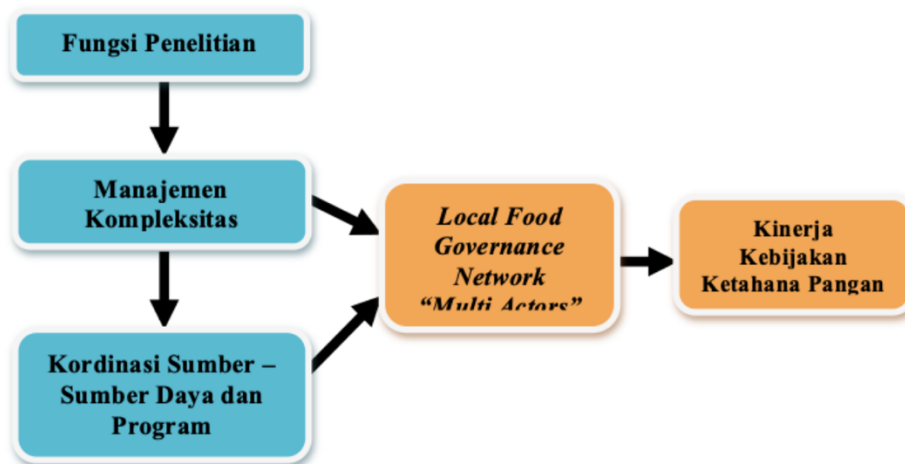
Ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat kompleks karena banyak aktor yang terlibat dalam mendefinisikan dan melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Hal ini juga berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan masalah serius yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah (Robert, 2000; Termeer et.al, 2015) dan membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan (Agranoff & McGuire, 2003; Klijn, 2008; O` Leary et al., 2009; Agranoff, 2012). Seperti yang dikatakan Timmer (2004), ketahanan pangan adalah barang publik.

Dari sudut administrasi publik, penyediaan barang publik secara langsung atau tidak langsung menjadi tanggung jawab negara (pemerintah). Ini menyediakan dan mendistribusikan makanan secara langsung jika diselenggarakan langsung oleh pemerintah. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab tersebut, pemerintah mengeluarkan Pangan Nopember 2012 (Sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996). Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan agenda penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian pula, ketahanan pangan menunjukkan otonomi dan kedaulatan suatu negara, karena krisis pangan dapat mengancam kedaulatannya. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Secara konseptual, ketahanan pangan adalah “sebagaimana didefinisikan oleh World Food Summit, ketika orang-orang Ball selalu memiliki akses fisik dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk hidup yang sehat dan aktif. Ada. . Ini termasuk: 2) akses; 3) pembuangan; 4) keberlanjutan; 5) stabilitas (Timmer, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan sangat sulit dan kompleks. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri, dan semua pemangku kepentingan harus terlibat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan strategi untuk berinteraksi dengan tantangan yang sulit dan kompleks ini. Strateginya adalah jaringan pemerintah daerah. Peran

pemerintah dalam hal ini adalah untuk dapat mengkoordinasikan mereka dan tindakan mereka serta mengelola saling ketergantungan di antara mereka (Mandell, 2000).

Berdasarkan uraian di atas, governance network merupakan konsep dan perspektif yang lebih jelas dan rasional ketimbang dengan perspektif lainnya dalam menjelaskan kompleksitas penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik.

Gambar 1 : State of The Art Penelitian Local COvernance Network dalam rangka peningkatan kinerja kebijakan ketahanan pangan



2. Aktor-aktor yang terlibat dalam Dewan Ketahanan Pangan

Masalah keamanan pangan adalah kerumitan kompleks yang membutuhkan beberapa aktor untuk terlibat dalam memperbaiki masalah perlindungan pangan. Para aktor yang bersangkutan berasal dari latar belakang yang berbeda tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sama tentang masalah agar mereka mampu menawarkan jawaban dalam memperbaiki masalah. Aktor sebagai pembuat kebijakan perlu menangkap permasalahan dan keinginan masyarakat luas, karena tujuan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan publik. Aktor-aktor yang berkepentingan dalam jaringan implementasi kebijakan keamanan pangan adalah aktor-aktor di dalam Dewan Keamanan Pangan sebagai badan usaha jaringan. Jaringan pelaksanaan cakupan ketahanan pangan mencakup otoritas, lembaga non otoritas dan lembaga tujuan atau bisnis berbasis masyarakat. perusahaan pemerintah, dalam contoh ini perusahaan otoritas yang terkait dengan aturan keamanan pangan, acara non-otoritas, khususnya Toko Tani Indonesia dan Bulog dan

badan usaha berbasis masyarakat adalah kelompok tani perempuan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan maksud untuk merealisasikan keputusan masalah pangan ini, kontribusi dari masing-masing aktor ini mungkin sangat dibutuhkan. Dari sisi kontribusi, masing-masing aktor memiliki fungsi yang mendukung masing-masing berbeda dalam mencapai tujuan perlindungan pangan. Bagi pelaku otoritas, kontribusi prinsip yang diberikan adalah sebagai perusahaan sumber, masing-masing ekonomi, kompetensi dan informasi. Metode prosedur mengenal sangat penting dalam meningkatkan kemampuan bottom-up organisasi Korten (1980). penyediaan aset tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab pihak yang berwenang dalam mewujudkan pemenuhan keamanan pangan. Kontribusi non-pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, khususnya mendorong pengembangan aset petani yang berkualitas tinggi melalui pengetahuan dan sosialisasi dan menjaga stabilitas pangan dicapai oleh organisasi terkait bersama dengan dinas pertanian melalui penyuluhnya.

Perusahaan non-pemerintah lainnya yang juga bergerak di wilayah Kabupaten Bone, Bulukumba, Toraja dan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah Toko Tani Indonesia. Perayaan ulang tahun LPTK ini turut serta dalam membagikan sumber daya berupa jual beli makanan yang tersedia bagi petani dan jaringan. Ketersediaan ini tidak selalu sederhana dalam produk, tetapi juga stabilitas dalam biaya. Toko petani Indonesia memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketersediaan dan keseimbangan harga. Begitu juga dengan ketersediaan pupuk beragun, menjaga kestabilan ketersediaan pupuk di Kabupaten Bone. Selama ini pupuk bersponsor ini menjadi masalah, terutama dalam hal distribusi yang dari waktu ke waktu tidak merata. Kontribusi CBO dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan menggunakan pengorganisasian masyarakat dalam bentuk korporasi untuk berpartisipasi aktif dalam nutrisi makanan keluarga yang menyenangkan dan manufaktur pertanian, masing-masing dalam penguasaan lahan dan meningkatkan hasil produksi. Organisasi berbasis jaringan ini mencakup tiga bagian, yaitu kelompok perempuan Tani yang mengkhususkan diri dalam mengorganisir wanita tani dan ibu rumah tangga dalam memenuhi nutrisi makanan keluarga sendiri, diversifikasi konsumsi makanan.

Dibawah ini adalah Program-Program dari anggota dewan Ketahanan Pangan :

Tabel 4.1: Program Anggota Dewan Ketahanan Pangan

Informan	Program
----------	---------

Dinas Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi pangan • Pemanfaatan pekarangan rumah
Dinas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan • Pengembangan jaringan irigasi • Peningkatan Produksi Pangan
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survey berkaitan dengan ketahanan pangan (angka Gizi buruk, angka stunting) • Mengsosialisasikan pangan yang bergizi, aman dan seimbang
Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat akses pertanian seperti irigasi dan infrastruktur jalan tani
Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan ekonomi serta menjaga stabilitas harga pasar
Dinas Koperasi & UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola simpan pinjam produk pangan masyarakat, serta terlibat menyiapkan modal kepada kelompok tani • Membentuk UMKM
Bulog	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli dan menampung beras dari petani dengan harga pemerintah dan menjamin ketersediaan beras
Penyuluh	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi kelompok sasaran • Mengedukasi petani
Toko Tani Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Membeli hasil pertanian • Menyediakan hasil pertanian untuk masyarakat • Distribusi pupuk bersubsidi
Lembaga Pemberdayaan Wanita Tani	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Wanita Tani Mandiri • Pengadvokasi masalah perempuan

Hasil Reduksi data : 2021

3. Proses Peran dan Fungsi Aktor Organisasi (Dewan Ketahanan Pangan)

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pangan yang kompleks ini sangat membutuhkan peran-peran dan fungsi-fungsi aktor yang terlibat, hal ini dilakukan agar supaya

penyelesaian masalah pangan bisa efektif. Dewan ketahanan pangan dalam menjalankan peran dan fungsinya telah sesuai dari bidang masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh salah anggota Dewan Ketahanan pangan melalui wawancara bahwa:

“Jika dewan keamanan pangan memang memiliki tanggung jawab dan fungsi dari setiap pesertanya, yang tugas dan kemampuannya sesuai dengan kewenangan perusahaan yang bersangkutan, maka pengangkut yang bersangkutan dikenal sebagai cabang teknis, maka jika misalnya pertanian kantor, dia bertanggung jawab atas statistik produksi, bagaimana manufaktur di tempat kerja pertanian, layanan perikanan apa yang mereka tanggung, sesuai dengan kewajiban dan kemampuan masing-masing dari bisnis yang relevan, berpengetahuan di dewan keamanan pangan untuk digunakan sebagai saran atau bahan referensi kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan observasi, baik dalam bentuk software kepentingan pada tahun berikutnya, baik melalui pemerintah daerah, maupun pada tingkat provinsi atau imperatif setiap dinas. Wawancara, 2021”

Selain itu, peran aktor-aktor lain dalam keterlibatannya dalam isu perlindungan pangan, termasuk Bulog, adalah menjadi kaki tangan dari Dewan Perlindungan Pangan, yang secara khusus memberikan informasi tentang pangsa pasokan pangan. Teknik peran ini dilakukan melalui jaringan Rumah Pangan Kita penggunaan mekanisme administrasi yang dapat dicakup melalui organisasi yang berlaku dalam masalah ketahanan pangan. Sementara itu, posisi dan ciri pelaku CBO, khususnya kelembagaan Perempuan Tani, adalah mengatur perempuan tani dan ibu rumah tangga dalam pemenuhan vitamin pangan lingkaran sanak saudara, diversifikasi konsumsi pangan.

4. Komunikasi Aktor

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, komunikasi puncak antar aktor mungkin sangat penting sehingga masalah ketahanan pangan menjadi kuat. Pertukaran verbal ini merupakan keinginan dasar yang diinginkan oleh para aktor dalam menangani masalah makanan, terutama karena masalah makanan sangat kompleks. Berkomunikasi dalam kelompok jaringan merupakan salah satu unsur yang menentukan tercapainya tujuan organisasi masyarakat. Pembicaraan yang dimaksud dalam penguasaan jaringan ini berkaitan dengan pengaturan interaksi antara aktor-aktor eksklusif (stakeholder) dalam jaringan cakupan untuk menyelesaikan suatu kerumitan atau hambatan yang akan mencapai tujuan positif bersama-sama. Dalam situasi ini percakapan juga dianggap sebagai percakapan yang bersifat eksternal atau horizontal serta komunikasi ini dalam bentuk konferensi formal atau informal. Para aktor di dalam Dewan Perlindungan Pangan biasanya saling memahami. Interaksi individu dan institusional telah selesai. Dalam jangka panjang, ini akan diukur berdasarkan interaksi yang dilakukan oleh otoritas, lembaga

non-otoritas, dan CBO. Interaksi ini dilakukan masing-masing dalam bentuk konferensi formal dan informal. Bagi pemerintah, waktu majelis terbatas karena rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) hanya dilakukan setahun sekali. Seperti yang dikatakan salah satu anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam wawancaranya bahwa:

“Kalau DKP saat ini berjalan, kemarin rapat, tapi saat ini dikurangi anggarannya karena kendala covid. Rencananya Dewan Ketahanan Pangan itu bersidang minimal satu kali dalam satu tahun, tingkat kabupaten itu dipimpin oleh bapak bupati. Kalau di kabupaten itu biasanya dilaksanakan pada bulan 7-8, provinsi 9- 10, kalau di pusat atau kementerian itu bulan 11. Karena di provinsi kan hasil dari kabupaten yang diangkat, hasil rapat dewan ketahanan pangan itu”. Wawancara, 2021.

Selain itu bahwa, koordinasi atau komunikasi yang terjalin dari masing-masing aktor dalam permasalahan pangan di Kabupaten Bone khususnya pemerintah , Provinsi Sulawesi Selatan adalah koordinasi informal. Bentuk koordinasi atau komunikasi ini adalah sering melakukan pertemuan baik dalam forum informal maupun dalam forum resmi lainnya, selain itu, sebagai birokrat di Kabupaten Bone mereka pada umumnya telah lama kenal secara personal.

4. Kepercayaan antar aktor

Kompleksitas dalam jaringan pemerintahan salah satunya terlihat dari adanya kondisi yang dinamis dan sulit untuk diprediksi serta tantangan dalam jaringan kebijakan yang semakin rumit (Kljn,Edelenbos,Steijn,2010). Tingginya rendahnya kepercayaan dalam jaringan kebijakan publik akan mempengaruhi proses dan pola interaksi antara aktor baik individu maupun kelompok dalam pencapaian tujuan kebijakan. Sub dimensi *kepercayaan* dalam organisasi jaringan tidak terlepas dari outcome yang dicapai dalam proses kerjasama aktor sesuai dengan kesepakatan bersama (Kljn,Edelenbos,Steijn,2010). *Kepercayaan* mempunyai pengaruh yang positif untuk meningkatkan kerjasama dalam organisasi jaringan, sehingga para aktor baik aktor individu maupun aktor dalam kelompok tidak melakukan penyimpangan pada kontrak yang telah disepakati.

Sub dimensi *Kepercayaan* dalam penelitian ini akan mengkaji kepercayaan dalam struktur organisasi jaringan Dewan Ketahanan Pangan diukur dari kepercayaan masing masing aktor pada perjanjian/ kontrak, manfaat kekuatiran, reliabilitas, ketiadaan perilaku oportunistis aktor dalam pelaksanaan program kebijakan ketahanan pangan yang disepakati dalam organisasi dewan ketahanan pangan. Berikut ini *kepercayaan* yang terjadi di Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone sebagai organisasi jaringan Ketahanan Pangan.

Tabel 2: Kepercayaan dalam Struktur Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Sulawesi Selatan

	Dimensi	Pemerintah	Non Pemerintah	CBO
KEPERCAYAAN	Kepercayaan pada perjanjian (Trust in Agreement)	Implementasi program belum efektif	Program yang dilaksanakan belum efektif	Pencapaian tujuan dari program belum efektif
	Manfaat Kekhawatiran (The Benefits of Doubt)	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Realibilitas (Reability)	Pelaksanaan program belum efektif	Efektif	Belum Efektif
	Kepastian perilaku oportunistis (The absence of opportunistic behavior)	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
	Kepercayaan pada niat baik (Trust in Goodwill)	Pencapaian Kebijakan ketahanan pangan belum efektif	Belum efektif	Belum Efektif

Sumber : Reduksi Data, 2021

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa dimensi kepercayaan dalam struktur organisasi jaringan Dewan Ketahanan Pangan dilihat dari 5 sub dimensi menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan aktor dalam organisasi jaringan dewan ketahanan pangan masih rendah. Hal ini didasari oleh palaksanaan program kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh aktor belum efektif. Akibatnya adalah tingkat konsumsi pangan yag belum beragam dikalangan

masyarakat bone. Hal ini dapat dilihat dari situasi konsumsi pangan beberapa kabupaten sampel :

Gambar 2 : Komposisi Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional							Pola Pangan Harapan Regional ⁵⁾		% AKG (FAO-RAPA) ⁶⁾
		WNPG VIII, 2004		WNPG XI, 2018		% AKG	Bobot ³⁾	Skor PPH ⁴⁾	% AKG	Skor PPH	
		Gram/hari	Energi (kkal)	Gram/hari	Energi (kkal)						
1.	Padi - padian	275	1000	289	1050	50.0	0.5	25.0	45.0	22.0	40.0 – 60.0
2.	Umbi-umbian	100	120	105	126	6.0	0.5	2.5	12.0	6.0	0.0 – 8.0
3.	Pangan Hewani	150	240	157	252	12.0	2.0	24.0	12.0	24.0	5.0 – 20.0
4.	Minyak dan Lemak	20	200	21	210	10.0	0.5	5.0	10.0	5.0	5.0 – 15.0
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	11	63	3.0	0.5	1.0	2.0	1.0	0.0 – 3.0
6.	Kacang-kacangan	35	100	37	105	5.0	2.0	10.0	5.0	10.0	2.0 – 10.0
7.	Gula	30	100	31	105	5.0	0.5	2.5	5.0	2.0	2.0 – 15.0
8.	Sayur dan Buah	250	120	262	126	6.0	5.0	30.0	6.0	30.0	3.0 – 8.0
9.	Lain - lain	-	60	-	63	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0 – 5.0
Jumlah			2000¹⁾		2100²⁾	100.0	-	100.0	100.0	100.0	

Keterangan: ¹⁾ AKE di tingkat konsumsi adalah 2.000 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 2004); ²⁾ AKE di tingkat konsumsi adalah 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018); ³⁾ Bobot kelompok pangan digunakan untuk penghitungan skor PPH nasional dan regional. ⁴⁾ Data diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, 2004. ⁵⁾ Skor PPH Regional digunakan sebagai standar/acuan komposisi pangan ideal Provinsi **Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat** ⁶⁾ Kisaran persentase energi terhadap AKG (FAO-RAPA, 1989) sebagai acuan menuju komposisi pangan ideal.

Sumber : Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian. 2021

Tabel 3: Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Bone, Bulukumba dan Toraja pada wilayah Pertanian (survey 2021)

No	Kelompok Pangan	Survey Kabupaten Bone 2021				Survey Kabupaten Bulukumba 2021				Survey Kabupaten Toraja 2021			
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi (kkal)	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi (kkal)	% AKG	Skor PPH
1	Padi-padian	323,2	1164,7	58,2	27,0	353,2	1134,7	59,2	29,0	303,2	1151,7	54,2	23,0
2	Umbi-Umbian	61,2	55,3	2,8	2,0	50,2	52,3	2,6	1,9	61,3	54,2	2,3	1,99
3	Pangan Hewani	38,4	310,6	15,5	24,0	40,4	410,6	17,5	26,0	37,4	300,6	12,5	22,0
4	Minyak & Lemak	38,4	310,6	15,5	5,0	39,4	313,6	18,5	6,0	37,4	310,8	14,5	4,0
5	Buah/Biji Berminyak	17,5	17,5	0,9	0,4	17,8	17,7	0,8	0,3	17,1	17,1	0,5	0,3
6	Kacang2an	19,7	67,5	0,4	6,8	19,8	67,8	0,4	6,8	19,7	67,5	,4	6,8
7	Gula	70,8	70,8	3,5	1,8	70,7	70,7	3,3	1,7	70,6	70,6	3,4	1,7
8	Sayur dan Buah	355,6	136,4	6,8	30,0	355,5	136,4	6,7	30,2	357,1	138,4	7,8	33,0
9	Lain-Lain	0,4	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0
	Jumlah	1.218,7	2.123,1	106,2	96,4	947,3	2204,1	109	104,6	904,3	2111,2	95,6	92,79

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat Bone, bulukumba dan toraja pada wilayah pertanian hanya ada 2 kelompok pangan yang mencapai skor PPH maksimum namun berlebih yakni padi-padian dan minyak dan lemak sehingga pola konsumsi perlu ditinggalkan untuk beberapa jenis pangan misalnya pangan gula, buah buahan, kacang-kacangan dan umbi-umbian sehingga mencapai skor pola pangan harapan nasional (PPH) yang telah ditentukan. Untuk angka kecukupan energy masyarakat di wilayah pertanian kurang dari konsumsi ideal (100%) dan tidak berimbang. Dilihat dari segi kuantitasnya yaitu jumlah kalori maka dapat dilihat masyarakat mengkonsumsi kalori sebesar kurang dari konsumsi ideal, hal ini disebabkan sumbangan kalori kelompok pangan yang dikonsumsi berkurang, sedangkan untuk melihat konsumsi pangan penduduk dari segi kualitasnya maka masyarakat di wilayah pertanian Kabupaten Bone, Bulukumba dan Toraja masih belum beragam ini dapat dilihat dari skor PPH yang diperoleh masih perlu ditingkatkan keragamannya melalui strategy yang harus lebih dimassivkan lagi terutama informasi dan bantuan.

Gambar 3 : Sasaran Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2024 Nasional (Menggunakan data dasar Susenas 2019)

No	Kelompok Pangan	Sasaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	59,8	58,3	56,7	55,2	53,7
2	Umbi-umbian	2,8	3,3	3,7	4,1	4,6
3	Pangan Hewani	11,5	11,6	11,6	11,7	11,8
4	Minyak dan Lemak	11,4	11,2	11,1	10,9	10,7
5	Buah/biji Berminyak	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2
6	Kacang-kacangan	3,1	3,3	3,6	3,9	4,1
7	Gula	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4
8	Sayur dan Buah	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
9	Lain-lain	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8
	% AKG	101,4	101,1	100,7	100,4	100,0
	Proyeksi¹⁾ :					
	Konsumsi Energi					
	Skor PPH (menggunakan AKE 2.100 kkal/kap/hari)	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2
	Realisasi²⁾ :					
	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.112				
	Skor PPH (menggunakan AKE 2.100 kkal/kap/hari)	86,3				

Keterangan

¹⁾Proyeksi : berdasarkan sasaran skor PPH 95,2 pada tahun 2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024)

²⁾Realisasi: Susenas 2020; BPS diolah BKP

Sumber : Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian. 2021

Tabel 4: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota Se Sulawesi Selatan, 2020

KABUPATEN/KOTA	Jml Penduduk Miskin (Dalam ribuan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan
Kepulauan Selayar	17,36	12,83	2,87	0,90	370,380
Bulukumba	30,49	7,26	0,60	0,09	330,161
Bantaeng	16,91	9,03	1,35	0,28	309,357
Jeneponto	54,05	14,88	2,02	0,41	359,883
Takalar	25,93	8,70	1,08	0,19	356,973
Gowa	57,99	7,53	0,92	0,17	385,820
Sinjai	22,27	9,14	1,08	0,22	294,916
Maros	34,85	9,89	2,50	0,89	405,944
Pangkajene Dan Kepulauan	47,07	14,06	1,81	0,31	322,958
Barru	14,92	8,57	1,07	0,21	322,248
Bone	76,25	10,06	1,35	0,29	325,422
Soppeng	16,45	7,25	0,69	0,12	297,546
Wajo	27,48	6,91	1,06	0,26	311,017
Sidenreng Rappang	14,44	4,79	0,60	0,13	312,800
Pinrang	31,85	8,46	1,54	0,40	294,349
Enrekang	25,40	12,33	1,70	0,38	331,667
Luwu	46,18	12,78	2,71	0,72	318,911

Tana Toraja	28,87	12,35	3,10	1,12	316,911
Luwu Utara	42,48	13,60	2,55	0,61	342,277
Luwu Timur	20,83	6,98	1,11	0,25	333,739
Toraja Utara	28,64	12,41	1,99	0,46	314,426
Makassar	65,12	4,28	0,60	0,15	418,831
Parepare	7,62	5,26	0,71	0,15	323,839
Palopo	14,37	7,82	1,15	0,29	324,233
<i>Sulawesi Selatan</i>	767,80	8,69	1,45	0,34	329,880

5. Pemahaman Aktor Terhadap Isu Pangan

Mewujudkan ketahanan pangan yang efektif pemahaman aktor yang terlibat dalam isu-isu pangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena aktor yang akan mengambil kebijakan serta mengimplementasikannya dapat lebih mudah dalam proses tersebut. Dewan Ketahanan pangan dalam masalah ini berdasarkan wawancara dengan anggota dewan ketahanan pangan bahwa:

“Kalau program sebenarnya melekat di dinas terkait, jadi itu dilaksanakan disana, jadi saat sidang itu yang dilaporkan, terkait bagaimana pelaksanaan sampai pada evaluasi kendalanya, itulah yang diramu bagaimana DKP untuk dijadikan rekomendasi untuk bisa ditindak lanjutinya. Mulai dari distribusinya, konsumsinya. Kebetulan pada sidang DKP 2020, ada peta rawan pangan, jadi kita DKP sendiri mengangkat isu itu bahwa di kabupaten bone, hasil ketahanan pangan itu namanya EVFSA Ketahanan pangan. Itu sudah sampai level desa, jadi sebagai kepala dinas melaporkan bahwa di bone masih ada yang ada daerah rawan pangan yakni tello limpoe dan bonto cani. Hasil itu kan muncul yang menjadi masalah ternyata infrastrukturnya, jadi tanggung jawab dinas PU. Kan dinas PU baru-baru ini mengambil rujukan untuk pelaksanaan 2020 merujuk ke situ untuk menentukan lokasi membangun, selanjutnya ditindak lanjutinya. Jadi, kita undang semua dinas terkait. Kalau kita ambil contoh di dua kecamatan ini, akses jalannya yang perlu diperbaiki. Jadi, SKPD terkait kalau mau buat program harus merujuk ke situ untuk penganggaran 2021. Jadi, ini menjadi salah satu bentuk bahwa dewan ketahanan pangan ini ada fungsinya. Bahwa daerah mana yang perlu ini melalui rapat itu. Semua itu ada dokumennya nanti dikumpulkan. Semua program kegiatan dari kementerian pertanian menganjurkan untuk berbasis data dan acuannya itu di peta rawan pangan. Contoh kegiatan lagi itu kegiatan pembuatan lumbung pangan itu mengacu pada peta rawan pangan. Tidak boleh menempatkan program tanpa ada dasarnya. Bone dan enrekang dapat bantuan dari pusat untuk pembuatan peta itu, anggarannya dari APBN. 2019 terima, 2020 penggunaan anggarannya. Itulah hasilnya yang kita laporkan dalam rapatnya bahwa di bone ini ada daerah yang rawan, jadi SKPD terkait bisa mengacu pada data dari DKP untuk intervensinya karena ada bukti dan dasarnya terkait daerah rawan pangan. PU kita berikan bukannya terkait itu, makanya dibangun merujuk pada itu, salah satunya mengambil dasarnya dari situ”. Wawancara, 2021.

Mencermati hasil wawancara di atas bahwa pemahaman antar aktor dalam hal ini dewan ketahanan pangan terhadap isu pangan masih pada batas terkait tugas-tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat ketika misalnya dinas PU mengusulkan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2021 yang merujuk pada rekomendasi yang telah diberikan oleh DKP untuk kepentingan ketahanan pangan.

B. Luaran Penelitian

Luaran Penelitian ini telah menghasilkan luaran wajib berupa LOA Artikel yang telah diterima pada jurnal RIGEO. ISSN : 2146-0353 dan telah mendapatkan undangan sebagai Keynote Speaker, sebagai keluaran tambahan pada output penelitian pada tahun pertama. Adapun rencana output penelitian ini selama tiga tahun dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.5. : Luaran Penelitian 2021-202

No	Jenis Luaran		Luaran		Indikator Capaian			
			Wajib	Tambahan	TS 2021	TS +1 2022	TS+2 2023	TS+n
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	International	√		Accepted	Published	Published	
		Nasional terakreditasi						
		Nasional tidak terakreditasi						
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional						
		Nasional						
		Lokal						
3	Keynote Speaker/Invited) Dalam temu ilmiah	Internasional		√	Draf	Ada (Proceeding)		
		Nasional						
		Lokal						
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	International						
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten sederhana	√	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
		Hak cipta	Tidak ada	√	Tidak ada	Draf	Published	
		Merek dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Rahasia dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Desain produk industri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Indikasi geografis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Perlindungan varietas tanaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Desain tata letak sirkuit terpadu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
6	Buku (ISBN)	Tidak ada	√	Tidak ada	Draf	Published		

7	Book-chapter (ISBN)		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
8	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	International	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Nasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
		Regional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
9	Angka partisipasi dosen*	√		3	3	3		
10	Dokumen feasibility study	√	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada		
11	Business plan	√	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada		
12	Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan atau model kebijakan strategis)		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

BAB. V

SIMPULAN DAN SARAN

Kapasitas tata kelola kolaboratif lokal menjadi menonjol untuk mengelola jaringan struktural dalam mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh tata kelola pangan lokal yang memiliki multi-stakeholder dan kepentingan yang beragam. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi kebijakan ini ditentukan oleh kapasitas organisasi kolaboratif, - Badan Ketahanan Pangan, dalam mengelola struktur jaringan yang kompleks. Organisasi ini belum mampu mengkoordinasikan dan memelihara saling ketergantungan di antara mereka karena dominasi struktur hierarkis yang tidak adaptif terhadap berbagai pemangku kepentingan yang kepentingannya berbeda-beda. Pemerintah sebagai inisiator dan motivator dalam proses tata kelola pangan daerah masih menggunakan metode birokrasi dalam pelaksanaan tata kelola pangan daerah. Selain itu, ia juga mengendalikan organisasi ini dengan menggunakan kepemimpinan birokrasi sehingga pemangku kepentingan di luar pemerintah tidak berkontribusi pada organisasi ini. Penataan tersebut menunjukkan tidak adanya kebersamaan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sistem kolaboratif, kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan organisasi merupakan komponen yang menonjol dari kapasitas tata kelola pangan lokal untuk mengelola saling ketergantungan pemangku kepentingan yang rumit karena hanya dengan cara ini dapat menjaga kebersamaan dan komitmen di antara mereka untuk pelaksanaan tata kelola pangan di tingkat lokal. dan tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agranoff, Robert and McGuire, Michael (2003) *Collaborative Public Decision Management: New Strategies for Local Government*, Georgetown University Press, Washington, D.C.
2. Agranoff, Robert (2012) *Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector*, Georgetown University Press, Washington, D.C.
3. Badan Ketahanan Pangan (2020) Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2020
4. Guillén, M. F. , & Ontiveros, E. (2012). *Global turning points. Understanding the challenges for business in the 21st century.* Cambridge University Press.
5. Jaffee, David (2001) *Organization Theory: Tension and Change*, McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
6. Jones, Gareth R. (2004) *Organizational Theory, Design, and Change: Text and Cases*, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA.
7. Klijn, Erik Hans & Koppenjan, Joop (2016) *Governance Network in Public Sector*. New York: Routledge.
8. Klij, E.H. (2018) *Networks as Perspective on Policy and Implementation* in: S.Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P. Ring (2008), *Handbook of Inter-Organizational Relations*, Oxford: Oxford University Press: 118-146.
9. Mandell, Myrna P. (2000). *A Revised Look at Management in Network Structure*. *International Journal of Organizational Theory & Behaviour*. 3(1&2). Pp. 185-209.
10. Manzel, Donald C, (2017) 'An Interorganizational Approach to Policy Implementation, *Public Administrative Quarterly* (1986 – 1998). Spring 1987. 11,1. ABI/ INFORM Complete
11. Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI- Press.
12. Roberts, Nancy (2000), *Wicked Problems and Network Approaches to Resolution*, In *International Public Management Review*. Vol. 1, Issue 1.
13. Scharpf, F.W. (1978) *Interorganizational Policy Studies: Issues, Concepts, and Perspectives*, in: K.L. Hanf and F.W. Scharpf (eds). 345-370.
14. Termeer, Carrien, J.A.M., Dewulf, Art., Breeman, Gerard., & Stiller, Sabina J. (2015) 'Governance Capabilities for Dealing Wisely With Wicked Problems, *Administration & Society*, Vol. 47(6) 680 –710.
15. Timmer, C. P. , & Dawe, D. (2017). *Managing food price instability in Asia: A macro food security perspective*. *Asian Economic Journal*, 21, 1–18.
16. Timmer, C. P. (2014). *Food price policy: The rationale for government intervention*. *Food Policy*, 14, 17–27
17. O'leary, Rosemary; Gazley, Beth; McGuire, Michael; and Bingham, Lisa Blomgren (2009), *Public Managers in Collaboration*, In O'leary, Rosemary and Bingham, Lisa Blomgren (Editor), (2009), *The Collaborative Public Manager: New Ideas for the Twenty-First Century*, Georgetown University Press, Washington, D.C.
18. O'Toole, Jr, Laurence J., (2015) 'Interorganizational Relations in Implementation', In B Gay Peters & Jon Pierre. 2005. In *Handbook of Public Administration*, SAGE Publications Ltd, London
19. Yin, Robert K., Prof.DR. 2000. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Cet. III, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Draf Desain Aplikasi Model Business Plan Kebijakan Ketahanan Pangan

MODEL BUSINESS PLAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN

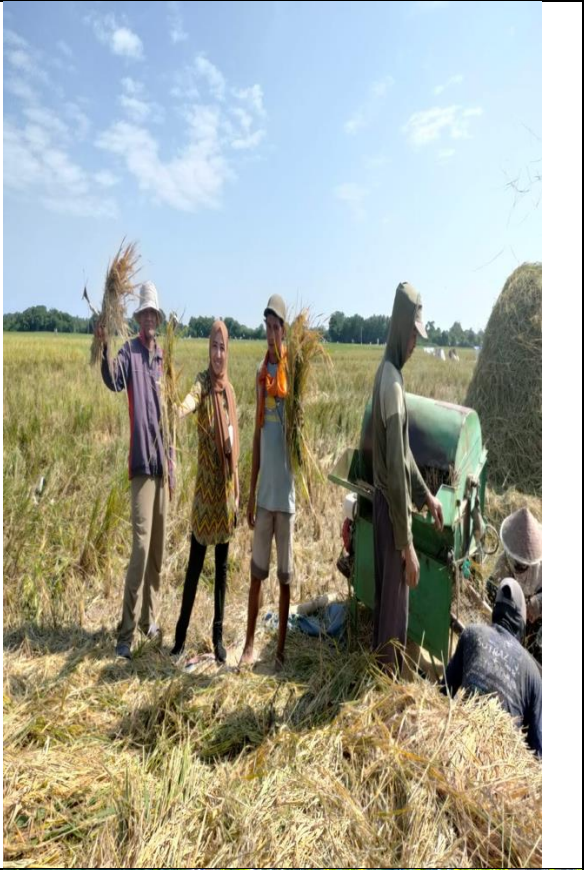


KEBIJAKAN PEMERINTAH SULAWESI SELATAN MEMBINA SEGALA SEKTOR MULAI DARI
PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KELAUTAN, KEHUTANAN TAMBAK DLL
UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN



2. Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan Penelitian









3. LOA Artikel



Date: 11/11/2021

Ref: Rigeo_Nov_2021-449

Journal Name: **Review of International Geographical Education Online (RIGEO)**

ISSN: 2146-0353

Manuscript Title:

**“LOCAL COLLABORATIVE GOVERNANCE CAPACITY OF MANAGING
NETWORK STRUCTURE IN THE IMPLEMENTATION OF FOOD SECURITY
POLICY IN INDONESIA”**

By

Rulinawaty
Universitas Terbuka

has been accepted for publication in the forthcoming issue of **Review of International Geographical Education Online (RIGEO)**

ACCEPTED PAYMENT	REVISIONS REQUIRED \$ 1500	REJECTED Open Jurnal System
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

With Warm Regards,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esra SİPAHi', is written over a light blue horizontal line.

Editor
Dr. Esra SİPAHi
Social Sciences University of
Ankara/ TURKEY
E-mail: editor@rigeo.org



Rektor Restui FT Unhas Jadi Institut

● Disampaikan saat Webinar Dies Natalis ke-61 FT Unhas ● Plt Gubernur: Masa Kalah dengan ITB

MAKASSAR, TRIBUN - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dwa Aries Tina Pulubuhu, merestui Fakultas Teknik (FT) Unhas bertransformasi menjadi institut. Apalagi, menurut Guru Besar Sosiologi ini, FT Unhas sudah sangat cukup siap dengan segala sumber daya yang dimiliki.

Prof Dwa menyampaikan hal tersebut saat pelaksanaan Webinar Nasional seri 1 dalam rangka Dies Natalis ke-61, Rabu (4/8). Sebelumnya, Dekan FT Unhas, Prof Muhammad Asyad Thaha, menyebutkan FT bisa menjadi institut karena punya kapasitas.

"Kapasitas ini belum sepenuhnya terpakai, apalagi kalau fakultas ini ditakdirkan jadi institut teknologi," katanya.

Prof Asyad mengatakan bahwa jika pemerintah dan rektor merestui, perlu ditentukan institut tersebut, fakultas teknik bisa lebih memberikan perannya lagi. "Masalahnya semakin besar perannya khususnya mengembangkan teknologi integratif di kawasan timur Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Prof Asyad mengatakan bahwa jika hal itu tercapai, institut bakal turut memajukan Unhas. "Sehingga bersama-sama dengan industri, semakin besar di kawasan timur Indonesia," katanya.

Pernyataan Prof Asyad ini pun ditanggapi Prof Dwa.

"Kalau semangat ingin menjadi institut harus kita hargai. Saya kira sudah cukup siap," katanya.

Olehnya itu, Prof Dwa

mengatakan agar bersama-sama menyusun suatu strategi atau rencana dalam mewujudkan sebuah institut.

"Tentu indikatornya adalah kesiapan dan produk-produk inovatif yang merupakan bagian dari kekuatan yang menjadi bagian dari institut," paparnya.

Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir sebagai narasumber dalam webinar Dies Natalis FT Unhas juga memberikan dukungannya terkait upaya FT Unhas menjadi institut.

Menurut Andi Sudirman yang juga merupakan alumni Fakultas Teknik, perubahan tersebut menunggu persetujuan Rektor Unhas Prof Dwa. "Tinggal menunggu ibu rektor, masa kita kalau dengan Institut Teknologi Bandung," katanya.

"Institut Teknologi Gowa aja namanya, pak bupatinya sudah siap, tinggal menunggu ibu rektor," sambungnya.

Dikatakan Andi Sudirman bahwa biasanya teknik berada di sebuah institut. "Bisa lebih cepat akselerasi karena bisa head to head, saya tidak masalah dia berada di bawah FTU, tapi itu kembali ke ibu rektor yang kita cintai," tuturnya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman mengatakan bahwa ia menaruh kepercayaan "bisikan" dari Jusuf Kalla (JK). "Soalnya yang bisikan kami sudah pak JK," katanya. (er6)



DIES NATALIS - Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Bupati Gowa Adnan Purichta Iman dan Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dwa Aries Tina Pulubuhu menghadiri Penetapan Dies Natalis Fakultas Teknik (Unhas) ke-61 di Fakultas Teknik Unhas, Kabupaten Gowa, Rabu (4/8). Acara ini juga diorganisir dengan penemuan techno exhibition hall dan webinar seri 1 dalam rangka Dies Natalis ke-61 Fakultas Teknik Unhas.

Luncurkan Incubator Technology & Business

WEBINAR Dies Natalis FT Unhas ke-61 juga dirangkaikan dengan peluncuran Incubator Technology & Business. Incubator ini merupakan salah satu fasilitas yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil riset.

"Kami punya hampir 100 laboratorium riset yang ada di fakultas ini, yang menghasilkan produk-produk inovatif, dan ini harus dihirsi, ini tujuannya," kata Prof Asyad.

Dirinya berharap, Incubator Technology & Business Fakultas Teknik Unhas ini bisa berhasil. Dalam proses pembangunannya, Incubator Technology & Business, Fakultas Teknik dibantu oleh PUM Netherlands senior experts.

Incubator Technology & Business ini sudah di-

kapi dengan ruang expo khusus Fakultas Teknik Unhas.

Di dalamnya, sudah diisi dengan produk-produk teknologi yang dihasilkan oleh Fakultas Teknik Unhas.

"Kehadiran Incubator FT Unhas ini sangat baik, mengingat hasil-hasil riset perguruan tinggi sangat kita dorong agar tidak hanya muncul sebagai publikasi, atau pameran, tapi betul-betul digunakan industri dan masyarakat," ucap Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek RI Prof Nizam. (er6)

FT Unhas Menuju Institut

- Lokasi: Jl Malino KM 6, Kabupaten Gowa
- Luas kampus: 40 hektare
- Diresmikan: Juni 2018
- Fasilitas: 4 Lecture Theatre, Komputer Center, dan perpustakaan. Gedung COT (Center of Technology), Asrama Mahasiswa, Incubator Technology & Business

Departemen di FT Unhas	
Departemen Teknik Sipil Program Sarjana Teknik Sipil Program Magister Teknik Sipil Program Doktor Teknik Sipil	Departemen Arsitektur Program Sarjana Arsitektur Program Magister Arsitektur Program Doktor Ilmu Arsitektur
Departemen Teknik Mesin Program Sarjana Teknik Mesin Program Magister Teknik Mesin Program Doktor Teknik Mesin	Departemen Teknik Geologi Program Sarjana Teknik Geologi Program Magister Teknik Geologi Program Doktor Teknologi Kebumihan dan Lingkungan
Departemen Teknik Perkapalan Program Sarjana Teknik Perkapalan Program Magister Teknik Perkapalan	Departemen Teknik Industri Program Sarjana Teknik Industri Program Magister Teknik Industri
Departemen Teknik Elektro Program Sarjana Teknik Elektro Program Magister Teknik Elektro Program Doktor Teknik Elektro	Departemen Teknik Kelautan Program Sarjana Teknik Kelautan
	Departemen Teknik Sistem Perkapalan Program Sarjana Teknik Sistem Perkapalan



"Masa kita kalah dengan Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Gowa saja namanya, Pak Bupati (Bupati Gowa) sudah siap, tinggal menunggu Ibu Rektor,"
Andi Sudirman Sulaiman, Plt Gubernur Sulsel

"Kalau semangat ingin menjadi institut harus kita hargai. Saya kira sudah cukup siap (jadi institut)"
Prof Dwa Aries Tina Pulubuhu, Rektor Unhas

"Kapasitas ini belum sepenuhnya terpakai, apalagi kalau fakultas ini ditakdirkan jadi institut teknologi. Insyaallah semakin besar perannya khususnya mengembangkan teknologi integratif di kawasan timur Indonesia"
Prof Muhammad Asyad Thaha, Dekan FT Unhas

Dosen UT-Unhas Riset Kebijakan Pangan di Bulukumba

MAKASSAR, TRIBUN - Dosen Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) kolaborasi riset terkait kebijakan pangan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Tim yang terdiri lima orang ini bertemu petani hingga pejabat setempat. Selasa (3/8).

Adapun tim riset ini diketuai Dr Rullinawaty, dari UT. Kemudian sebagai anggota yakni Dosen UT lainnya, Dr E Andriyansah, Prof Awi dari Unhas, Maswardi, dan Rusladi.

Dr Rullinawaty menjelaskan riset ini terfokus pada food governance network. "Untuk tahun pertama (2021) ini fokus tujuan penelitian yakni pada kelayakan industri pada aspek perantaraan berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di

Sulsel," ujarnya.

Hal ini dilakukan lanjut Dr Rullinawaty lantaran masalah pangan utamanya di masa pandemi Covid-19 di negara maju dan berkembang menjadi masalah nyata dan berat. Menyebabkan penderitaan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.

Apalagi data yang diperoleh sebanyak 70 Kabupaten/Kota se-Indonesia rentan rawan pangan pada tahun 2020. Padahal Indonesia berada di peringkat 62 dunia dengan indeks ketahanan global.

"Hal ini menunjukkan dengan kebijakan anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah pangan tidak signifikan dengan tunjangan kebijakan pangan. Hal yang sama di Sulsel dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi belum nagitpa data BPS tahun 2020

tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 8,99 persen," ungkapnya.

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pangan menghadapi masalah yang kompleks. Kemudian berpengaruh terhadap kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan masyarakat.

Hal inilah yang ditemui Dr Ruli bersama peneliti lain saat wawancara dengan Lurah Terang-terang, Kecamatan Ujung Bala, Bulukumba, Andi Mappigappa.

"Pemerintah perlu menciptakan networking, sinergitas antara para aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks yang tentu saja berpengaruh pada kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan masyarakat," jelas Ruli yang juga Dosen pada bidik Administrasi Publik. (er7)

Sosiologi UNM Buka Kelas 'Putus Kuliah'

● Lewat Penerimaan Camaba Program RPL Kemendikbud Ristek

MAKASSAR, TRIBUN - Peralih kuliah tapi drop out (DO)?, atau putus kuliah di tengah perjalanan? Jangan khawatir kalian berkesempatan bisa kuliah kembali di kampus negeri. Saat ini Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Negeri Makassar (UNM) membuka jalur pendaftaran calon mahasiswa baru (camaba) Program Rekrutasi Pembelajaran Lampau (RPL).

Ketua Prodi Sosiologi FISH UNM, Idham Irawansyah mengatakan program ini merupakan cetusan Direktorat Kemendikbudristek. "Program ini berupa pembebasan sejumlah mata kuliah atau perolehan SKS untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi," ucap Idham Irawansyah, Selasa (3/8) sore.

Tujuannya, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar sepanjang hayat melalui pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi. Lewat program ini, masyarakat yang pernah putus kuliah bisa melanjutkan kembali kuliahnya.

Dengan catatan, punya pengalaman kerja dan kompetensi yang relevan untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. "Pen-

dafarannya gratis, bahkan yang lolos nanti akan mendapat subsidi biaya kuliah satu semester hingga Rp2,4 juta," bebernya.

Terkait nominal UKT yang harus dibayarkan untuk semester berikutnya, Rektor UNM Prof Hussain Syam masih melakukan penggodokan. "Kualahnya ikut di regular. UKTnya menunggu penandatanganan dari rektor," ujarnya.

Izuzahnya juga sama dengan mahasiswa reguler lainnya yang terdaftar pada PD-DIKTI. Dijelaskan Idham, RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya.

RPL ini merupakan cara lain untuk meraih gelar sarjana, utamanya bagi para pegawai instansi, karyawan swasta, atau wiraswasta. (er7)

- SYARAT MENGIKUTI RPL:**
1. Lulusan SMA/ sederajat atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai.
 2. Lulusan Diploma 1/2/3 atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tapi tidak selesai.
 3. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi terkait yang menunjukkan penguasaan CP Kompetensi secara parsial atau secara utuh.
 4. Menenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.
 5. Tata Cara Pendaftaran: 1. Pendaftaran dilakukan melalui link: <http://rpl.kemendikbud.go.id>
 6. Pilih tarptan RPL-A
 7. Pilih pendaftaran kemudian isi dengan lengkap
 8. Pilih Universitas Negeri Makassar dan Program Studi Sosiologi
 9. Pilih menu riwayat pekerjaan, pelatihan, dan pendidikan kemudian lengkapi
 10. Setelah dilengkapi, muncul opsi upload dokumen
 11. Setelah semua kriteria terisi, klik SUBMIT